

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi di dunia perbankan semakin meningkat dan maju, saat ini masyarakat sudah di permudah dengan adanya teknologi dan saat ini masyarakat sudah sangat melek akan teknologi yang berkembang. Dunia teknologi semakin maju begitu juga kejahatan semakin banyak, saat ini pemalsuan uang merajalela bukan jumlah kecil tetapi mencapai nilai milyaran rupiah. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang tidak bisa terkontrol, berawal dari ini Bank Indonesia mulai mensosialisasikan penggunaan transaksi non tunai kepada masyarakat.

Gerakan Nasional Non Tunai atau biasa di singkat dengan (GNNT) merupakan bentuk nyata kebijakan pemerintah dalam mengatasi beberapa masalah keuangan di Indonesia seperti pemalsuan uang , inflasi dan bank Indonesia menyatakan bakwa gerakan nasional non tunai ini dapat menghemat anggaran pemerintah dalam mencetak uang kartal. Dengan adanya GNNT ini maka pertumbuhan keuangan akan semakin melambat sehingga dapat menghemat jumlah uang atau jumlah berapa milyar uang yang akan di cetak oleh PERURI. (www.tempo.com)

Semakin berkembangnya perekonomian di suatu negara semakin meningkat pula kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan pendanaan untuk

membiyai dalam usahanya. Untuk menutupi hal tersebut maka perbankan nasional berperan penting dan strategis dalam kaitannya dengan persediaan permodalan pengembangan sector produktif. Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat.

Di Indonesia sendiri lembaga perbankan mengalami kemajuan dan perkembangan yang meningkat, tidak hanya bank konvensional akan tetapi bank syariah juga sangat berkembang sangatnya cepat, berkembangnya bank syariah dikarenakan masyarakat sudah mendambakan atau menginginkan lembaga keuangan yang bukan hanya finansial semata melainkan baik dari segi moralitas, hal tersebut tercermin pada bank syariah yang tidak menggunakan prinsip bunga (riba) dalam operasionalnya melainkan dengan sistem bagi hasil dari suatu usaha.

Menurut Muhammad dalam bukunya Manajemen Pembiayaan Bank Syariah adalah :

“ Lembaga keuangan perbankan yang operasionalnya dan pokoknya dikembangkan berlandaskan Al- Quran dan Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariat islam”.
(Muhammad, manajemen Bank Syariah ,Yogyakarta,UPP,AMP, YKPN.h.13)

dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah menjalankan operasionalnya dan produk-produknya harus berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist atau sesuai dengan syariat islam.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
(90)

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”.

Disini jelas terlihat bawasannya perbankan syariah harus bertindak adil dalam pelaksanaannya. Adil disini bersikap dengan syar’i ataupun menjauhi riba karena perbankan syariah tidak mementingkan dunia semata tetapi juga mementingkan akhirat. Dan saat ini hanya lembaga keuangan syariah berskala besar yang mampu berkembang seperti Bank Syariah namun lembaga keuangan syariah berskala kecil pun sudah mulai menunjukkan perkembangan yang cukup baik seperti halnya Baitul Mal wa at-Tamwil (BMT)

Perkembangan itu sudah mulai nampak setelah ada beberapa unit bisnis di Indonesia yang mulai berkembang untuk untuk maju, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan juga Unit Usaha Syariah (UUS). Untuk Bank Umum Syariah (BUS) terdapat 12 bank sedangkan untuk Unit Usaha Syariah (UUS) terdapat 26 unit usaha, jumlah ini untuk tahun 2016 dan perkembangan yang cukup baik ini dapat memperkuat perekonomian di Indonesia. Dan perkembangan dunia perbankan syariah di Indonesia tak lepas atau membutuhkan lembaga keuangan lain salah satunya yaitu Baitul Mal wat Tamwil (BMT). (www.bi.go.id)

Dalam kondisi yang demikian inilah BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah muncul dan mencoba menawarkan solusi bagi masyarakat kelas bawah. BMT sendiri merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang bisa di bilang paling sederhana, realitas dilapangan dalam beberapa tahun demikian BMT tumbuh dan berkembang sangatlah pesat. Perkembangan BMT yang pesat ini terjadi karena tingginya kebutuhan masyarakat akan jasa intermediasi keuangan, namun di sisi lain akses ke dunia perbankan yang lebih formal relatif sulit dilakukan. BMT lahir di tengah tengah masyarakat dengan tujuan memberikan solusi pendanaan yang mudah dan cepat, terhindar dari rentenir, dan mengacu pada prinsip syariah. Gerakan yang gesit dan di kelola oleh tenaga-tenaga muda yang progresif dan inovatif, serta pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan membuat BMT cepat populer. (Ahmad,2008:22)

BMT dalam merespon permasalahan ekonomi yang di sebabkan oleh globalisasi. Gerakan BMT dalam wadah koperasi baik dalam bentuk koperasi simpan pinjam (KJKS) atau juga unit jasa keuangan syariah (UJKS) rasanya sangat tepat untuk menghadapinya, ini dapat dirasakan karena beberapa alasan sebagai berikut : *pertama*, peran usaha mikro dan kecil dalam memberikan kontribusi terhadap pembentukan *produk domestik bruto* (PDB), penyerapan tenaga kerja dan investasi sangatlah menentukan dalam menggerakan perekonomian suatu bangsa. *Kedua*, apabila kita menelaah lebih dalam pelaku usaha mikro menunjukan skala paling banyak dibandingkan skala usaha menengah dan besar. Dengan komposisi yang demikian, peran usaha mikro dan

kecil menjadi sangat besar dan tidak dapat diabaikan dalam membentuk struktur perekonomian suatu negara. Dengan kuantitas yang besar serta perannya terhadap aspek makro ekonomi tersebut, maka kita berkewajiban untuk secara berkesinambungan memberdayakan usaha mikro dan kecil sehingga dapat terus berkembang dan maju. *Ketiga*, BMT juga potensial sebagai alat pengentas kemiskinan karena adanya perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengembangan kewirausahaan. (Ahmad,2008;18)

Perkembangan teknologi operasional dan ilmu pengetahuan yang semakin pesat telah memberikan peranan ke segala sektor, salah satunya sektor keuangan dan perbankan. Di dalam sektor keuangan dan perbankan, peranan dari perkembangan teknologi operasional dan sistem informasi telah menghadirkan alat pembayaran non tunai dan secara elektronik atau lebih dikenal dengan *elektronik money*.

Elektronik money itu sendiri adalah inovasi terbaru dari dunia perbankan, dan *elektronik money* yaitu sebuah alat pembayaran atau alat transaksi yang menggunakan elektronik sebagai media dimana sejumlah nilai uang tersimpan di dalam media elektronik. *Elektronik money* muncul sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap instrumen pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara lebih cepat, efisien, dan aman.

Terdapat banyak keuntungan pemanfaat *elektronik money*, dengan elektronik money pengguna tidak perlu membawa uang tunai dan tidak di

binggungkan dengan uang kembalian. *Elektronik money* juga memberi kemudahan, keamanan, nasabah juga lebih nyaman karena tidak perlu pergi dan membawa uang tunai untuk melakukan transaksi sehingga nasabah menjadi lebih dimudahkan dalam melakukan kegiatan perbankan tanpa batas ruang dan waktu.

Dengan hadirnya *e-money* tidak hanya penggunanya saja yang mendapatkan banyak manfaat melainkan juga menciptakan efek manfaat yang lain bagi bank itu sendiri, yakni meningkatkan pendapatan berbasis komisi atau biaya (*fee based income*). Sebagian besar *fee* berasal dari layanan transaksi yang ditawarkan *e-money*. Selain itu, biaya operasional juga menjadi sangat murah dibandingkan dengan biaya transaksi melalui kantor cabang.

Berbagai penawaran produk jasa yang dikeluarkan bank sebagai turunan dari jasa *e-banking* dalam kemudahan akses oleh bank dengan nasabah, salah satunya menggunakan *mobile banking*. *Mobile banking* adalah layanan informasi perbankan *via wireless* paling baru yang ditawarkan pihak bank dengan menggunakan teknologi aplikasi *handphone* untuk mendukung kelancaran dan kemudahan kegiatan perbankan. Dengan *mobile banking*, nasabah tidak perlu lagi ke ATM ataupun ke bank untuk melakukan transaksi perbankan seperti *mentransfer* uang, cek saldo, ataupun pembayaran tagihan-tagihan (kecuali penarikan uang tunai). Penting bagi nasabah untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam memperoleh informasi keuangan dan melakukan transaksi secara online terlebih bagi mereka yang memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Selain itu, keunggulan dari *mobile banking*

adalah keamanan *user-id* yang tidak setiap orang bisa mengetahuinya kecuali pemilikinya. Berdasarkan keunggulan yang dimiliki oleh *mobile banking* tersebut, pihak perbankan yakin dapat menarik minat nasabah dengan memberi layanan yang sejenis. (Suci :2012)

Pada saat ini, masyarakat tentunya mengharapkan kecepatan proses pembayaran dan transaksi demi kelancaran kegiatan mereka sehari-hari. Masyarakat membutuhkan sistem pembayaran yang cepat, handal, dan aman dalam bertransaksi. Alat transaksi yang bersifat praktis dan efisien tentunya didambakan oleh masyarakat. Adanya perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan ilmu pengetahuan telah menciptakan inovasi-inovasi serta produk-produk baru dalam pembayaran non tunai berbasis elektronik (*electronic payment*).

Bank Indonesia sebagai bank sentral, sangat mendorong penggunaan transaksi non tunai menuju terciptanya LCS (*Less Cash Society*). Dengan berkurangnya penggunaan uang tunai maka negara dapat menurunkan jumlah pencetakan uang tunai sehingga menurunkan anggaran pencetakan uang. Selain itu dengan makin berkurangnya penggunaan uang tunai yang beredar, maka biaya penyimpanan dan penyortiran uang di perbankan juga akan menurun drastis. Penurunan penggunaan uang tunai akan berimbas pada penurunan jumlah uang palsu. (Allen, Thomas dan Linker. 1992)

Untuk mendukung peningkatan transaksi non tunai, bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.14/2/PBI/2012 tentang

perubahan atas PBI No.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. (www.bi.go.id)

Tidak hanya mengeluarkan rujukan penyelenggaraan pembayaran non tunai dengan menggunakan kartu, BI juga turut memperhatikan aspek penggunaan jasa sistem pembayaran non tunai. Maka dari itu Bank Indonesia menerbitkan PBI No.16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran sebagai panduan aspek perlindungan konsumen serta PBI No.16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas PBI No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Elektronic Money*)

Karena Pemahaman masyarakat mengenai sistem perbankan syariah masih terbatas dan Perbankan syariah belum bisa mencakup semua kalangan masyarakat, padahal potensi dunia perbankan syariah sangatlah besar karena indonesia sebagian besar beragama muslim. Oleh karena itu di harapkan BMT dapat terus berkembang dan dapat bisa menjadi mitra bisnis perbankan syariah di Indonesia, BMT di harapkan dapat berinovasi lebih maju.

Karena dalam pengelolaannya banyak BMT masih menggunakan metode dan tehnik secara tradisional, akibatnya kepercayaan masyarakat berkurang. Misalnya, masalah kepercayaan dalam laporan. Sistem komputerisasi tentu lebih bisa di percaya di bandingkan manual dan masalah kemudahan akses serta fasilitas untuk anggota untuk di permudah dalam bertransaksi masih menggunakan jemput bola.

Maka dari itu pembaharuan sistem operasional sangat di perlukan untuk BMT agar dapat bersaing, mungkin dengan terobosan lebih modern. *Elektronik Money* mungkin terobosan bagus tetapi bank indonesia menyatakan bawasannya alat ini hanya di peruntukan kepada perusahaan besar dan canggih yakni dunia perbankan dan juga telekomunikasi, sedangkan untuk perusahaan yang masih berbasis mikro tidak diperbolehkan. Padahal perusahaan mikro juga banyak yang melakukan transaksi dengan jumlah besar.

Jika BMT dapat membuat gebrakan atau inovasi yang lebih modern akan menambah rasa kepercayaan serta menambah jumlah nasabah yang akan bertransaksi di BMT tersebut tetapi juga tidak melanggar aturan yang di tetapkan. Dan satu-satunya BMT yang sudah berinovasi dan merespon cepat Gerakan Nasional Non Tunai yaitu BMT Bina Umat Sejahtera (BUS) Lasem di Rembang, Jawa Tengah diimplementasikan digitalisasi dalam produknya.

Untuk mendukung pelayanan kepada seluruh nasabahnya, juga di bangun sistem akuntansi berbasis online tersebut yang bekerjasama dengan PT USSI Prima Software dan di dukung oleh PT Wahana Investasi Nusantara. BMT Bina Umat Sejahtera saat ini telah dapat menggunakan ATM, *internet banking* dan merilis kartu EDC. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti :

“PERKEMBANGAN SISTEM OPERASIONAL BMT BINA UMAT SEJAHTERA LASEM DI REMBANG PASCA ADANYA GERAKAN NASIONAL NON TUNAI “

B. BATASAN DAN RUMUSAN MASALAH :

1. Batasan masalah

Agar penelitian ini dapat fokus, sempurna dan tertuju maupun mendalam maka penulis melihat permasalahan penelitian yang perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu , penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan “ Perkembangan Sistem Operasional BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem di Rembang Pasca Gerakan Nasional Non Tunai”, disini yang di teliti perkembangan sistem operasional non tunai atau pasca adanya Gerakan Nasional Non Tunai di BMT Bina Ummat Sejahtera

2. Rumusan Masalah

Bagaimana sistem operasional elektronik money di BMT Bina Umat Sejahtera ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan Sistem Operasional BMT setelah adanya Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi penulis :

Memberikan tambahan ilmu serta memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perbankan.

2. Bagi pembaca :

Memberikan informasi tentang bagaimana maksud Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), serta bagaimana tindakan atau sikap usaha mikro dalam menghadapinya.

3. Bagi peneliti :

Memberikan bahan acuan penelitian untuk penelitian selanjutnya.

4. Bagi perbankan:

Sebagai bahan pertimbangan bagi BMT dalam menyikapi atau mengambil keputusan menghadapi gerakan nasional non tunai ini.